





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Kamboja No.15 Telp./Fax.(0517) 21370 e-mail : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com KANDANGAN 71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 007 TAHUN 2017

TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014– 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

- 1. bahwa sesuai hasil reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 perlu merevisi RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2014 – 2018
- 2. bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kabupaten;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 19. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan

Pangan (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2014-2018 disempurnakan atau direvisi sesuai dengan pembentukan dan

susunan perangkat daerah yang baru.

KEDUA : Penyempurnaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun

2014-2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal, 9 Maret 2017

Kepala Dinas,

Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP

Pembina Utama Muda MIP 19601014 198703 1 009

DAFTAR ISI

DAF	TAR	ISI	i
KATA	A PE	NGANTAR	ii
Bab	- 1	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab	Ш	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	8
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
		2.2 Sumber Daya	10
		2.3 Kinerja Pelayanan	19
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Organisasi	32
Bab	Ш	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN	
		FUNGSI	35
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
		Fungsi Pelayanan	35
		3.2 Te <mark>l</mark> aahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil	
		Kepala Daerah	35
		3.3 Telaahan Renstra BKP Pusat	42
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	54
Б.		3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	55
Bab	IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRAT <mark>EGI</mark> DAN	
		KEBIJAKAN	58
		4.1 Visi dan Misi Organisasi	58
		4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	58
Dak	١,,	4.3 Strategi dan Kebijakan	61
Bab	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR	
		KINERJA , KE <mark>LOMOK</mark> SASARAN <mark>DAN PE</mark> NDANAAN INDIKATIF	64
			64 64
		5.1 Program dan Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan	65
Dob	VI	5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran INDIKATOR KINERJA ORGANISASI YANG MENGACU	oo
Bab	VI	PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	66
Bab	\/II	PENUTUP	67
Dau	VII	I LINU I UI	$\mathbf{U}I$



ETAHANAN PANG

Pembina Utama Muda NIP. 19601014 198703 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, maka penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bupati Hulu Sungai selatan dalam mendukung program Bupati Hulu Sungai Selatan dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan memuat program dan kegiatan dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Kandangan, Maret 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Pembina Utama Muda

NIP. 19601014 198703 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam RPJMD baru untuk periode 2014 – 2018 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas – komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial – ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program – program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial – ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu : Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

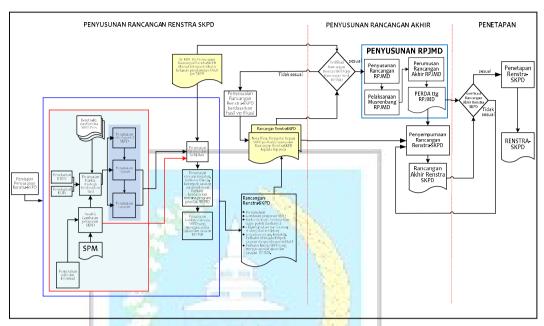
Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan (2014 – 2018), dan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu Unit Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, kebijakan dan strategis organisasi serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pem<mark>bangunan ketahanan pang<mark>an</mark> dan</mark> sumberdaya manusia pertanian kurun waktu 5 (lima) tahun secara efisien dan sinergi dengan kebijakan menyeluruh, terintegrasi, pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 merupakan acuan, arahan, kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2014 – 2018.

Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Proses penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Gambar 1.1 memperlitahkan bagan alir penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



Menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai amanat dari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Daerah, berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu perlu melakukan penyesuaian dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Ketahanan Pangan bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian No: 11 /Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama lima tahun ke depan;
- Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada
 Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan;

b. Tujuan

- Membantu Seluruh Jajaran Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan;

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Soft III II It's a

BAB II Gambaran Pelayanan

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Tantangan dan Peluang Pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah , Strategis dan Kebijakan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

Bab ini di uraikan kaidah – kaidah untuk melaksanakan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS.



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1 Perubahan Struktur Organisasi

	Bapeluh dan KP (SOTK Lama)		Dinas Ketahanan Pangan (SOTK Baru)
1. 2. 3. 4.	Kepala Badan Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan c. Sub Bagian Keuangan Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan a. Sub Bidang Program Penyuluhan b. Sub Bidang Informasi Penyuluhan Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan a. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan b. Sub Bidang Distribusi Pangan c. Sub Bidang Keamanan Pangan Kelompok Jabatan Fungsional	1. 2. 3. 4.	Kepala Dinas Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan a. Seksi Ketersediaan Pangan b. Seksi Distribusi Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan b. Seksi Keamanan Pangan Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Strategis, Program dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- 2. Merumuskan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- 3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- 4. Melaksanakan evaulasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- 5. Melaksanakan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- 6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas

Sesuai peraturan Bupati tesebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang.

克克尔夫 III II 1750

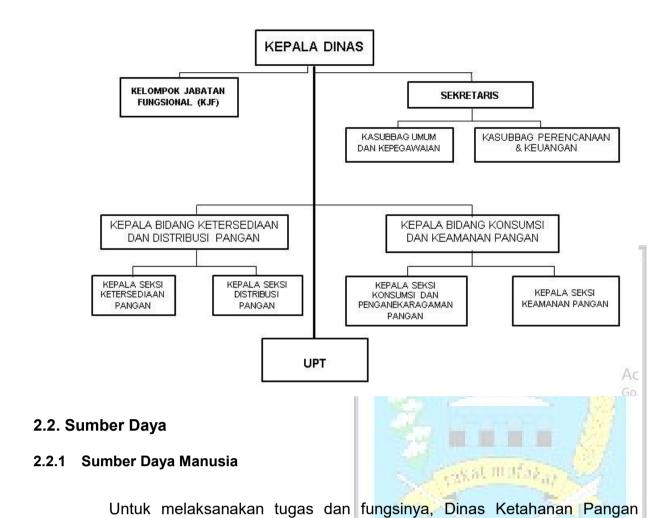
Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat Dinas
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - Seksi Ketersediaan Pangan
 - Seksi Distribusi Pangan
- 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Seksi Konsumsi dan penganekaragaman Pangan
 - Seksi Keamanan Pangan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan memiliki Struktur Organisasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1Struktur Tata Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS



didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatan Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan	1	Pimpinan Tinggi
			Pratama
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubag. Perencanaan dan	1	Pejabat Pengawas
	Keuangan		
5.	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi	1	Pejabat Administrator
	Pangan		
6.	Kasi Distribusi Pangan	1	Pejabat Pengawas
7.	Kasi Ketersediaan Pangan	1	Pejabat Pengawas
8.	Kabid. Konsumsi dan Keamanan	1	Pejabat Administrator
	Pangan		

9.	Kasi Konsumsi dan	1	Pejabat Pengawas
	Penganekaragaman Pangan		
10.	Kasi Keamanan Pangan	1	Pejabat Pengawas

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengadministrasi Umum	1	
2.	Pengemudi	0	
3.	Pramu Kebersihan	0	
4.	Pramu Bakti	1	
5.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	
6.	Pengelola Kepegawaian	1	
7	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	
	Kantor		
8.	Pengadministrasi Sarana dan	1	2000
	Prasarana	100	
9.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	0	
10.	Pengelola Keuangan	1	43.200
11.	Pengelola Gaji	1	
12.	Analis Pangan Bidang Distribusi	0	
13.	Analis Pangan Bidang Konsumsi	0	
14.	Pengelola Ketersedian dan	0	Ave
	kerawanan Pangan	Cod III	
15.	Pengelola Ketahanan pangan	0	
16.	Pengawas Harga Pangan	0	at mutakan Telek
17.	Pengelola Pola Pangan Harapan	0	
18.	Pengelola Penganeka ragaman Pangan	0	A.
19.	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Jajan Anak Sekolah	0	
20.	Penyuluh Pangan	0	

Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pranata Komputer	1	

Tabel 2.4 Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Petugas Kebersihan	1	
2.	Penjaga Malam	1	
3.	Pendamping Desa Mandiri Pangan	7	

Tabel 2.3
DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

NO	ATASAN LANGSUNG	JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN		
I. S	SEKRETARIAT					
1	SUB BAG. UMPEG	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi		
		Pengemudi	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pelayanan antar jemput pejabat/ pegawai dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.		
		Pramu Kebersihan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penyiapan p <mark>eralat</mark> an dan men <mark>j</mark> aga kebersihan		
		Pramu Bakti	SLTA di bidang Ilmu yang dibutuhkan administrasi perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di kantor		
		Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA/DI/ DII/ DIII dibidang manajemen perkantoran / administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabata	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang Kepegawaian		
		Pengelola Kepegawaian	Minimal Diploma III di bidang Manajemen/ Ilmu Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian		

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

NO	ATASAN LANGSUNG	JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Minimal Diploma III di bidang Manajemen/ Administrasi/ ilmu pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kantor
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran / administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana
2	SUB BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Analis laporan Akuntabilitas Kinerja	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ekonomi / Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang laporan akuntabilitas kinerja
		Pengelola Keuangan	Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan
		Bendahara	Diploma III di bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan, pengelu <mark>aran</mark> dan pembukuan terkait transaksi keu <mark>ang</mark> an
		Pengelola Gaji	Minimal Diploma III di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang gaji
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang perencanaan dan program

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

NO	ATASAN LANGSUNG	JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
			tugas jabatan	
2	2. BIDANG KETERSEDIAA	AN DAN DISTRIBUSI	PANGAN.	
1	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	Pengelola Ketersedian dan kerawanan Pangan .	Minimal Diploma III di bidang ekonomi pertanian /Akutansi/ Manajemin/ Ekonomi Pembangunan / Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan Kegiatan pengelolaan yang meliputi penyeapan bahan , koordinasi dalam penyusunan laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
		Analis Pangan .	Sarjana (S1)/Diploma IV di Bidang Ekonomi Pertanian /Akuntansi /Manajemen Ekonomi Pembangunan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan .	Melakukan Kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pangan
		Pengelola Ketahanan pangan	Minimal Diploma III di bidang ekonomi pertanian /Akutansi/ Manajemin/ Ekonomi Pembangunan / Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan Kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang ketahanan pangan
2	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Pengawas Harga Pangan .	Sarjana (S1)/Diploma IV di Bidang Ekonomi Pertanian /Akuntansi /Manajemen Ekonomi Pembangunan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan Kegiatan yang meliputi penerimaan dan Penelahan Dokumen serta pengawasan dibidang harga pangan .sesuai dengan Petunjuk tehnis.
3	B. BIDANG KONSUMSI DA	N KEAMANAN PANO	GAN.	

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

14

NO	ATASAN LANGSUNG	JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
1	SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN.	Pengelola Pola Pangan Harapan.	Minimal Diploma III dibidang Manajemen /Administrasi Negara /Psikologi /Sosial dan Politik /Tehnik Informatika / manajemen Tehnik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi pengumpulan ,pengklarifikasian dan Penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun Rekomendasi Pola Pangan Harapan (PPH) serta pelaporan sesuai dengan Petunjuk tehnkis untuk ketepatan sasaran Program.
		Pengelola Penganeka ragaman Pangan.	Minimal Diploma III di Bidang Pertanian /Manajemen / Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan Kegiatan Pengelolaan yang meliputi Penyiapan bahan ,koordinasi dan Penyusunan Iaporan di Bidang Pe Tehninganeka ragaman .
		Analis Penganeka ragaman makanan	Sarjana (S 1) diploma IV dibidang Kesehatan Masyarakat / Kebijakan Kesehatan atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan Kegiatan yang meliputi pengumpulan peklasifikasiandan Penelaah untuk menyimpulkan dan Menyusun rekomendasi di Bidan keamadengan Petunjuk tehnis untuk ketepatan sasaran Program .
2	SEKSI KEAMANAN PANGAN.	Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarkat	Sarjana (S1)/Diploma IV di Bidang Kesehatan Masyarkat / kebijakan / Kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan .	Melakukan Kegiatan pengumpulan bahan ,Informasi dan Data dibidang Pangan ,sesuai dengan Pedoman kerja dan Juknis untuk bahan Analisa Program.
		Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Jajan Anak Sekolah .	Minimal Diploma III dibidang Manajemen /Administrasi Negara /Psikologi /Sosial dan Politik /Tehnik Informatika / manajemen Tehnik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan Kegiatan yang meliputi Pengelolaan yang meliputi Penyiapan bahan ,Koordinasi dan Penyusunan Laporan di bidang Keamanan pangan segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah .
		Penyuluh Pangan .	Sarjana (S1)/Diploma IV di Bidang Ekonomi Pertanian /Akuntansi /Manajemen Ekonomi Pembangunan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan .	Melakukan Kegiatan yang Meliputi pengumpulan pengkklasifikasian dan Penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang Pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan studio, sarana informasi dan sebagainya.

Gedung kantor

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor eks BIMAS yang dipakai buat ruang sekretariat dan Kepala Dinas dan 1 (satu) rumah dinas camat sebagai ruang kegiatan 2 bidang serta fasilitas aula/ruang rapat yang dapat menampung kurang lebih 50 orang untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Ketahanan Pangan.

Gambar 2.3
Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gedung kantor yang digunakan oleh Dinas Ketahan Pangan Kab. HSS beralamat di Jl. Kamboja No.15 Kandangan, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas, kapasitas gedung ini belum cukup memadai, karena masih memakai rumah dinas camat untuk ruang kegiatan 2 bidang.

Gambar 2.4Rumah Dinas Camat yang dipergunakan Kegiatan Bidang



Melalui kegiatan APBD Kabupaten Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang sedang berjalan, telah dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, meliputi pemeliharaan rutin penambalan atap yang bocor, pengecatan dan pergantian kunci pintu yang rusak.

Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS meliputi: Komputer, LCD Projector, Telepon dan Faximile, serta sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel. 2.4Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan

No.	Nama Peralatan
1	Laptop
2	LCD Projector
3	Telepon
4	Faximile
5	Wi-fi
6	AC Split
7	Camera Digital
8	Handycam
9	Komputer (PC)
10	Printer

11	Wireless/Sound System
12	Kipas Angin
13	UPS / Stabilizer

- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - Sepeda motor roda 2 sebanyak 7 unit.
 - Mobel 1 buah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Sesuai dengan azas akuntabilitas, maka perlu reorientasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Artinya, penyelenggara pelayanan publik harus berorientasi pada pelanggan/masyarakat. Karena itu survey berkala untuk mendengar aspirasi dan keluhan

pelanggan/masyarakat terhadap pelayanan publik perlu terus dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas perbaikan yang dilakukan. Pengukuran kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap layanan yang diberikan di satu sisi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan ISO 9001 : 2008 masih harus meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga perlu dilakukan pengukuran mengenai tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kab. Hulu Sungai Selatan

1) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Target angka kecukupan gizi (AKG), konsumsi tiap hari tiap orang berdasarkan rekomendasi *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)* ke-8 tahun 2004 rata-rata adalah sebesar 2.000 KKal untuk energi dan 52 gram untuk protein.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Konsumsi Energi sudah melebihi rata-rata target yaitu dengan capaian 2150 (Kkal/Kap/Hari) atau 94,4 % AKE (Angka Kecukupan Energi). Sedangkan Konsumsi Protein sebesar 64,9 (Gram/Kap/Hari) atau 103,07 % AKP (Angka Kecukupan Protein). Selengkapnya dapat dilihat dari tabel 7 dibawah ini.

Tabel 2.5 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

No	Karakteristik Agroekologi	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Ha ri)	Tingkat Konsumsi Energi (% AKE)*)	Konsumsi Protein (Gram/Kap/H ari)	Tingkat Konsumsi Protein (% AKP)*)	Skor PPH
1	Wilayah Pertanian	1.739,1	87,0	51,5	99,1	90,2
2	Wilayah Perikanan	1.765,5	88,3	53.4	102.7	87,3
3	Wilayah Lainnya	1.962,8	98,1	55.9	107.4	92,9
4	Kabupaten	1.822,5	91,1	53,6	100,3	90,9

*) **Keterangan**: Angka Kecukupan Energy (AKE) = 2.000 KKal/Kap/Hari Angka Kecukupan Protein (AKP) = 52 Gram/Kap/Hari

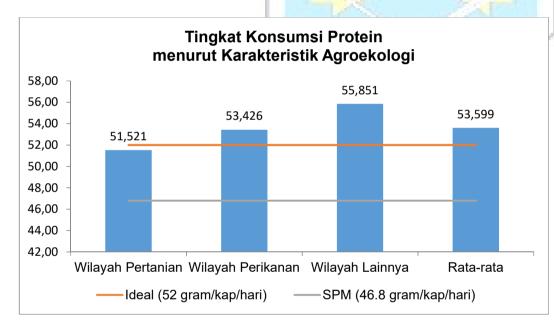
Pada Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat konsumsi energi dilihat dari karateristik agroekologi masyarakat Hulu Sungai Selatan dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu wilayah pertanian tingkat konsumsi energi sebesar 1.739,1 Kkal/Kap/hari atau 87,0 % AKE, wilayah perikanan 1.765,5 Kkal/Kap/Hari atau 88,3 % AKE, dan wilayah lainnya 1.962,8 Kkal/Kap/Hari atau 98,1 % AKE, sedangkan konsumsi protein wilayah pertanian sebesar 51,5 (Gram/Kap/Hari) atau 99,1 % AKP, wilayah perikanan 53,4 (Gram/Kap/Hari) atau 102,7 % AKP dan wilayah lainnya sebesar 55,9 (Gram/Kap/Hari) atau 100,3 % AKP. Sehingga diperoleh angka Kabupaten konsumsi energi sebesar 1.822,5 Kkal/Kap/Hari atau 91,1 % AKE dan konsumsi protein sebesar 53,6 (Gram/Kap/Hari) atau 100,3 % AKP artinya Kuantitas ketersediaan pangan perkapita per hari untuk energi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru mencapai angka kecukupan energi sebesar 1.822,5 Kkal/Kap/Hari atau ketersediaan energi rata - rata 91,1 % AKE per tahun masih kurang dari angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII yaitu sebesar 2.000 KKal/Kap/Hari untuk energi dan angka kecukupan protein 53,6 (Gram/Kap/Hari) atau 100,3 % AKP per tahun melebihi dari angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII yaitu 52 Gram/Kap/Hari untuk protein.Hal tersebut disebabkan konsumsi energi (Kkal) tiap orang tiap hari di wilayah berbeda sehingga Karateristik wilayah mempengaruhi pola pangan masyarakatnya, seperti Jika dilihat dari Tabel 2 maka konsumsi energi (Kkal) tiap orang tiap hari di wilayah lainnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan total wilayah, hal

tersebut disebabkan tingginya konsumsi padi-padian, umbi-umbian, Pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta sayur dan buah. Kalau di wilayah pertanian yang paling tinggi adalah konsumsi padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan sedangkan untuk wilayah perikanan yang paling tinggi adalah mengkonsumsi buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah.

Tabel 2.6 Konsumsi Energi Berdasarkan Klasifikasi Wilayah

		Konsumsi Energi	Tingkat Kecukupan Energi (%)					
Kelompok/Jenis Pangan	Wilayah Pertanian	Wilayah Perikanan	Wilayah Lainnya	Total Wilayah	Wilayah Pertanian	Wilayah Perikanan	Wilayah Lainnya	Total Wilayah
KAB. HSS	1.739,1	1.765,5	1.962,8	1.822,5	87	88,3	98,1	91,1
1. Padi-padian	976,9	1.018,7	1.112,4	1.036	97,7	101,9	111,2	103,6
2. Umbi-umbian	32,8	10,7	23,4	22,3	27,4	8,9	19,5	18,6
3. Pangan Hewani	226,4	217,2	240,4	228	94,4	90,5	100,1	95
4. Minyak dan Lemak	223,2	266,8	302,1	264	111,6	133,4	151	132
5. Buah/Biji Berminyak	17,2	8,7	10,1	12	28,6	14,4	16,8	20
6. Kacang-kacangan	51	49,4	61,6	54	51	49,4	61,6	54
7. Gula	70,4	69,4	75,8	71,9	70,4	69,4	75,8	71,9
8. Sayurdan Buah	128,9	113,6	126,9	123,1	107,4	94,6	105,7	102,6
9. Lain-Lain	12,3	11	10,2	11,1	20,4	18,3	16,9	18,6

Gambar 2.5
Grafik % Tingkat Konsumsi Protein



Sedangkan konsumsi protein atau angka kecukupan protein (AKP) tiap-tap wilayah juga berbeda tetapi sudah memasuki kategori sedang

bahkan ada wilayah yang sudah memasuki kategori baik, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Di wilayah pertanian AKP 99,1 % dengan kategori sedang, di wilayah perikanan AKP 102,7 % dengan kategori baik dan di wilayah lainnya AKP 103,1 dengan kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam sudah tercermin di masyarakat.

2) Penguatan Cadangan Pangan

Indikator ini menggambarkan bahwa dengan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan untuk mengantisipasi masa panen/masa paceklik, penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Selain itu memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Pengembangan cadangan pangan melalui pengembangan lumbung masyarakat, dilakukan pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Pembangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan dibangun secara bersama dan berkelompok. Sampai saat ini jumlah lumbung pangan yang ada sebanyak 10 lumbung pangan masyarakat. Pengembangan Lumbung Pangan dimaksudkan agar masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung melalui cadangan pangan penguatan pangan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Kemandirian kelembagaan yang dimaksud, memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan

anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan masyarakat yang dapat digunakan pada saat paceklik atau harga mahal, dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya pada saat harga rendah untuk dijual kembali pada saat harga lebih tinggi. Kegiatan pengembangan kelembagaan lumbung pangan tidak hanya dilaksanakan dengan pembangunan fisik, namun juga disertai pembinaan terhadap kelembagaan lumbung pangan yang ada melalui penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok.

Untuk tahun 2012 kegiatan Pengembangan Lumbung dan Pangan Desa diarahkan pada kegiatan Rehab Lumbung Adat di Kecamatan Loksado untuk membantu kelompok lumbung dalam meningkatkan jaringan usaha di bidang pengadaan beras gunung dan meningkatnya kemampuan pengelola kelompok lumbung dalam menangani cadangan pangan masyarakat. Diharapkan dengan memberdayakan kelembagaan penguatan lumbung pangan melalui cadangan pangan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. **克瓦利** 用用物点。

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 yaitu pembangunan 3 buah lumbung pangan beserta lantai jemur nya yang diakomodir melalui dana DAK Pertanian yang berlokasi di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara, Desa Ulang dan Desa Loksado Kecamatan Loksado. Sedangkan lantai jemur lokasi nya di Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang dan Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan.

Sedangkan lumbung yang sudah berisi cadangan pangan (gabah) bisa dilihat di tabel 9 berikut :

Tabel 2.7
Lumbung Cadangan Pangan (Gabah)

No	Nama Lumbung/Alamat	Stok Awal Gabah (kg)	Penyaluran Gabah (kg)	Stok Akhir Gabah (kg)
1	Al-Barakah Desa Asam Kec. Sungai Raya	5000	5000	-
2	Pematang Gudam Desa Panjampang Bahagia Kec. Simpur	6000	-	6000
3	Basamaan Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan	-	-	-
4	Bangun Banua Desa Kayu Abang Kec. Angkinang	440	440	-

5	Telaga Bidari Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya	-	-	-
6	Balimau Sejahera Desa Balimau Kec. Kalumpang	2620	120	2500
7	MuningKarya Mandiri Desa Muning Baru Kec. Daha Sel	4000	-	4400
8	Lumbung Lungau Desa Lungau Kec. Kandangan	-	•	-
9	Telaga sili-Sili Desa Telaga Sili-Sili Kec. Kandangan	6360	4000	2360
10	Dewl Sri Desa Bamban Selatan Kec. Angkinang	-	-	-
11	Serumpun Desa Tabihi Kec. Padang Batung	5120	•	5120
12	Bago Tanggul Desa Bago Tanggul	6000	5600	400
13	Suka damai Desa Urui Kec. Loksado	8000	1540	6460
14	Suka Maju Desa Ulang Kec. Loksado	3540	2000	1540
15	Karya Mandiri Desa Pasungkan Kec. Dh. Utara	3400	3400	-
16	Carnik Karya Usaha Desa Mandala Kec. TI.Langsat	3500	3500	-

9. Cadangan pangan gabah

Gambar 2.6 Lumbung Pangan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Desa Kayu Abang



Desa Telaga Sili-Sili



Desa Balimau



Desa Muning Baru



Desa Asam



Desa Bamban Selatan



Desa Lungau



Desa Bago Tanggul



Desa Panjampang Bahagia



Desa Telaga Bidadari

3) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan

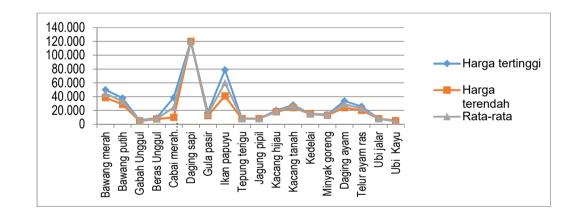
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 18 komoditi pertanian di 11 kecamatan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian. Hasil pendataan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan. Hasil pendataan merupakan suatu gambaran dinamis perkembangan harga pasar komoditi pertanian yang dapat memperlihatkan naik turunnya harga. Harga pasar dipengaruhi beberapa

faktor antara lain masa panen, jarak dari lokasi produksi, iklim, geografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada saat panen raya harga turun sedang pada musim paceklik harga naik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.8Harga 18 Komoditi Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen s/d
Desember Tahun 2016 Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Komoditi	Satuan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Rata-rata
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bawang merah	Kg	50.000	38.750	44.375
2	Bawang putih	Kg	38.000	28.750	33.375
3	Gabah Unggul	Kg	5.800	4.600	5.200
4	Beras Unggul	Kg	8.900	7.520	8.075
5	Cabai merah besar	Kg	38.750	10.000	24.375
6	Daging sapi	Kg	120.000	120.000	120.000
7	Gula pasir	Kg	17.000	12.500	14.750
8	Ikan papuyu	Kg	78.750	41.000	59.875
9	Tepung terigu	Kg	8.000	8.000	8.000
10	Jagung pipil	Kg	8.000	8.000	8.000
11	Kacang hijau	Kg	20.000	18.000	19.000
12	Kacang tanah	Kg	28.000	24.000	26.000
13	Kedelai	Kg	15.000	15.000	15.000
14	Minyak goreng	ml/btl	14.000	13.000	13.500
15	Daging ayam	Kg	33.750	24.000	28.875
16	Telur ayam ras	Kg	26.000	20.000	23.000
17	Ubi jalar	Kg	8.000	8.000	8.000
18	Ubi Kayu	Kg	5.000	5.000	4.000

Gambar 2.7 Grafik Harga



Grafik diatas menunjukkan bahwa:

- Harga cabai besar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 38.750,-/kg.
- Harga bawang merah berkisar antara Rp. 38.750,- s/d Rp. 50.000,-/kg.
- Harga bawang putih berkisar antara Rp. 28.750,- s/d Rp. 38.000,-/kg.
- Harga ikan papuyu berkisar antara Rp. 41.000,- s/d Rp. 78.750,-/kg.
- Harga komoditi lainnya relatif stabil.

4) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Salah satu program atau kegiatan untuk meningkatkan akses pangan melalui stabilitasi harga pangan dan terjaminnya ketersediaan adalah peranan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Jumlah LUEP APBN telah memberikan peranan yang cukup tentang stabilitasi harga-harga pemantapan ketersediaan pangan di samping menumbuhkan kekuatan daerah melalui LUEP APBD. LUEP APBN tahun 2006 sebanyak 6 buah kemudian di tahun 2008 ditiadakan. Selanjutnya di LUEP APBD sampai tahun ini berjumlah 9 buah.

Tabel 2.9

Jumlah Lembaga Usa Ekonomi Perdesaan (LUEP) Kab HSS

No	Kabupaten -	Tahun 2006 s/d 2016			
		APBN	APBD	JUMLAH	
1.	Hulu Sungai Selatan	6	9	15	

Pembiayaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat bersumber dari APBN pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan disalurkan ke 4 Gapoktan Tahap Penumbuhan sebagai dana Bansos sebesar Rp. 225.000.000/ 1 (satu) Gapoktan yang dialokasikan untuk cadangan pangan sebesar Rp. 10.000.000, untuk distribusi pangan (jumlah beli gabah/beras) sebesar Rp. 180.000.000 dan untuk pembangunan gudang atau lumbung pangan sebesar Rp. 30.000.000. sedangkan dana bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp. 50.000.000, diperuntukan untuk penambahan modal pembelian gabah.

Tabel 2.10Gapoktan Pelaksana Kegiatan P-LDPM Kab. HSS

Gapoktan/Poktan	Alamat	Tahun	Besar Dana (Rp)	Sumber Dana
Banua Jaya	Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan	2009	225.000.000	APBN
Bangun Banua	Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang	2009	225.000.000	APBN
Barakat	Desa Amparaya Kecamatan Simpu	2013	225.000.000	APBN
Suka Damai	Desa Loksado Kecamatan Loksado	2014	50.000.000	APBD PROV
Poktan Murung Raya	Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat	2014	50.000.000	APBD PROV
Poktan Mutu Usaha	Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara	2014	50.000.000	APBD PROV
Pokt an Harapan Indah	Desa Parigi Kecamatan Daha Utara	2014	50.000.000	APBD PROV

5) Pencapaian Indeks Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH atau Pola Pangan Harapan (Desirable Dietary Pattern) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan dan pola konsumsi pangan.

Skor PPH anjuran sesuai WNPG tahun 2004 adalah 100 yang menandakan pola konsumsi sudah beragam, bergizi, berimbang dan aman, dengan tingkat kecukupan energi 2000 kalori dan protein 52 gram per hari. Indonesia diharapkan bisa mencapai skor PPH 95 pada tahun 2014.

Tabel 2.11
Tingkat Capaian Energi/Protein dan Pola Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi Kab. Hulu Sungai Selatan

Komoditas	Capaian Kinerja					
Komoditas	Target	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.000	1.885	1.854	1.822,5	1888	2150
Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	52	51,4	52,5	53,6	50,9	64,9

PPH Tingkat Konsumsi	100	88,8	89,7	90,9	74,8	75,4	
-------------------------	-----	------	------	------	------	------	--

Dari tabel tersebut dapat digambarkan Indeks PPH yang ditampilkan berdasarkan karakteristik agroekologi secara umum PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 capaian kenerja masih belum mencapai target, hal ini dikerenakan keragaman pola makan masyarakat masih menoton sedangkan konsumsi energi kkal/kap/hr dan Konsumsi Protein sudah melebihi dari target.

Tabel 2.12Capaian Energi/Protein dan
Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

						Programme and the second
		% A	AKE			Selisih %
No	Kelompok Pangan	Aktual	Harapan	% Aktual	Interpretasi	Aktual & Harapan
1.	Padi-padian	24,5	18,7	49,1	Lebih	50,9
2.	Umbi-umbian	2,8	2,2	5,6	Lebih	94,4
3.	Pangan Hewani	42,0	24,0	21,0	Lebih	79
4.	Minyak & Lemak	4,0	3,1	8,1	Lebih	91,9
5.	Buah/biji Berminyak	1,9	1,0	3,8	Lebih	96,2
6.	Kacang-kacangan	4,8	3,7	2,4	Lebih	97,6
7.	Gula	1,9	1,4	3,7	Lebih	96,3
8.	Sayur & Buah	28,0	21,3	5,6	Lebih	94.4
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0,6	Cukup	99,4

Berdasarkan hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami masalah dalam hal konsumsi pangan terutama dari aspek keragaman, ditunjukan oleh skor dan komposisi PPH dimana hampir semua konsumsi pangan mengalami nilai lebih

Peningkatan Percepatan Penganganekaragaman Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui kegiatan optimalisasi, pekarangan, pemberian makan tambahan pada SD/MI serta penguatan kelompok wanita tani (KWT) melalui usaha tepung-tepungan.

6) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit. Kasus-kasus hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan saat ini di kabupaten Hulu Sungai Selatan masih bersifat sosialisasi/pelatihan, antara lain sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, pelatihan baik teori maupun praktek pengolahan pangan lokal menjadi jajanan yang sehat dan menarik bagi anak sekolah SD/MI serta sosialisasi tentang keamanan pangan. Koordinasi lintas sektoral dan subsektor terkait keamanan pangan belum optimal sehingga perlu upaya meningkatkan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar melalui kegiatan sosialisasi, promosi dan edukasi serta pertemuan instansi terkait tentang keamanan pangan segar kepada konsumen.

7) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Langkah-langkah implementasi penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pengembangan desa mandiri pangan, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penaganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan serta intervensi melalui penanganan daerah rawan pangan dengan penyediaan dana bansos rawan pangan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya memfasilitasi penaganan kerawanan pangan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan dengan cara meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Sasaran penerima manfaat adalah Rumah tangga miskin di desa rawan pangan (kelompok afinitas).

Guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui proses pemberdayaan selama 4 tahapan dalam 4 tahun/tahun yaitu Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian. Untuk desa yang telah dibina selama 4 tahun dan telah mandiri dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan disekitarnya.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 merupakan program pusat yang pendanaannya melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) dan sharing dana APBD Kabupaten Hulu Sungai <mark>Sel</mark>atan. Penyusunan rencana kegiatan ini mulai Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang saling terintegrasi dan dilakukan secara bottom up dikembangkan dengan pendekatan partisipatif yang dengan masyarakat sebagai pihak menempatkan utama atau pusat pengembangan dimulai dari perencanaan Tingkat Desa.

Seleksi pemilihan desa sebagai calon pelaksana program ini didasarkan pada indikator FIA (*Food Insecurity Atlas*) atau Peta Rawan Pangan, yaitu desa yang termasuk desa rawan pangan (minimal 30 % penduduknya termasuk KK miskin).

Sementara Desa Mandiri Pangan yang telah teridentifikasi dan di bina di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 7 desa mandiri pangan. Yang terdiri dari 1 desa yang menjadi pelaksana desa inti, 1 desa pasca mandiri, tahap kemandirian 2 desa, tahap pengembangan 1 desa, tahap penumbuhan 1 desa 1 desa serta tahap persiapan 1 desa.

Sedangkan pengembangan dari desa inti yaitu desa reflikasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 8 desa, 3 desa di Kecamatan

Angkinang yang bersumber dana dari APBN, 3 desa di Kecamatan Daha Selatan bersumber dana dari APBN, dan 2 desa di Kecamatan Simpur.

Tabel 2.13Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Tahap	Dana	Desa/Kec.	Kelp. Afinitas (Kelp)
1	2	3	4	5
1.	Persiapan (Thn 2010)	APBN	1. Panjampang/Simpur	3
2.	Pertumbuhan (Thn 2009)	APBN	1. Tabihi/Padang Batung	2
3.	Pengembangan (Thn 2008)	APBN	1. Balimau/Kalumpang	2
4.	Kemandirian (Thn 2007)	APBN	Muning Baru/Daha Selatan Telaga Sili-sili/Angkinang	2 2
5.	Desa Inti (Tahun 2006)	APBN	1. Kayu Abang / Angkinang	4
6.	Desa Binaan (Tahun 2006)	APBD Kab.	1. Bago Tanggul/Kalumpang	4

Tabel 2.14
Desa Reflikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Tahun	Desa Reflikasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	2010	Bamban UtaraBamban SelatanLongawang	Pengembangan dari desa inti Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang
2.	2011	HabirauTambanganBanjarbaru	Pengembangan dari desa inti Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan
3.	2013	GarunggangPantai UlinPakapuran KecilHamayungPeramaian	Pengembangan dari desa inti Desa Panjampang Bahagis Kecamatan Simpur
Total 11 desa		11 desa	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Peluang (Opportunity)

a. Adanya teknologi yang selalu berkembang.

- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan.
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi dan berkualitas.
- d. Potensi diversifikasi bahan pangan.

2.4.2 Tantangan (Threat)

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.
- b. Perubahan iklim.
- c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- d. Fluktuasi harga pangan.
- e. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- f. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.

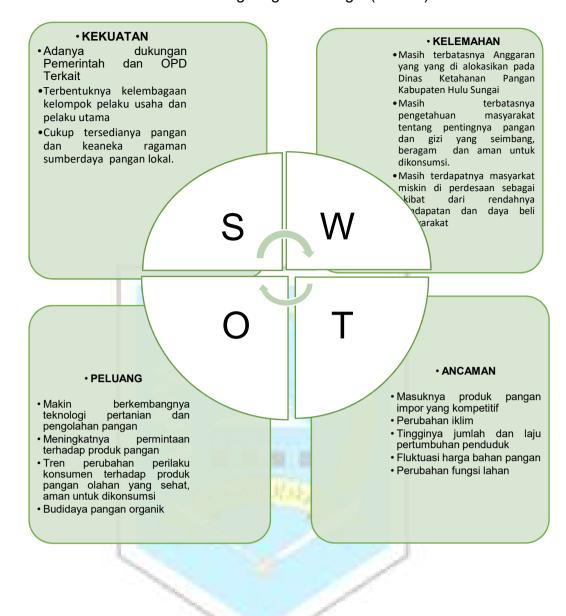
2.4.3 Analisis Lingkungan Internal

- a. Potensi (kekuatan) yaitu :
- 1) Adanya dukungan Pemerintah dan OPD terkait
- 2) Terbentuknya kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama.
- 3) Cukup tersedianya pangan dan keaneka ragaman sumberdaya pangan lokal.

b. Sedangkan kelemahan (kendala) yang ada yaitu :

- 1) Masih terbatasnya Anggaran yang yang di alokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai
- 2) Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam dan aman untuk dikonsumsi.
- 3) Masih terdapatnya masyarkat miskin di perdesaan sebagai akibat dari rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.15Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)



BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misi antara lain :

- 1. Masih rendahnya dana penganggaran Cadangan Pangan Daerah (beras)
- 2. Kurang siapnya lembaga petani/masyarakat penerima manfaat kegiatan program ketahanan pangan
- 3. Belum optimalnya lumbung pangan masyarakat
- 4. Belum optimalnya pemberdayaaan masyarakat yang kurang mampu dibidang pangan
- 5. Masih tingginya konsumsi beras sebagai bahan pokok
- 6. Masih rendahnya pola pangan harapan (PPH)
- 7. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI:

"Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif"

· 分析 (注:111 日下30 点。)

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu:

- "Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera" yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.
- "Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis" yang ditandai dengan suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Tak dapat dielakan sebagai dampak dari pembangunan disegala bidang, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang sangat cepat dimasyarakat dalam era globalisasi selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya

terjadinya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

"Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif" yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik dibanding periode sebelumnya yakni:

- Pada aspek sumber daya manusia (SDM)
 Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat.
 - 1.1. Bidang pendidikan, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai- nilai dan moral agama, (b) meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatnya angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014 2018) pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005 2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata- rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf 98,99%, APK SD 116,43, APK SMP 105,14, APK SMA 45,76, APM SD 100, APM SMP 78,18 dan APM SMA 41,76.
 - 1.2. Bidang Kesehatan, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.
 - 1.3. Bidang sosial budaya, yang ditunjukan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai- nilai agama, tata nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat,

(c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

2. Pada tata kelola pemerintahan,

- 2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif.
- 2.2. Pemerintahan, yang ditunjukan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya *good governance* dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2.3 Pada aspek perekonomian daerah yang berbasis agribisnis dan agroindustri, yang ditunjukan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60%.
- 2.4 Sektor pertanian, yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian
- 2.5 Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya nilai tambah produk- produk unggulan, (b) berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Kandangan sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam.
- 2.6 Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.
- 2.7 Infrastruktur, yang ditunjukan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan system pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana

- perumahan, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.
- 2.8 Tata ruang yang ditunjukan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah.
- 3 Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang ditunjukan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan- lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit
- 4 Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang ditunjukan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah.
- Pada kehidupan beragama, yang ditunjukan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya secara kaffah sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial umat, (c) meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi.

· 克斯森比 III 1170 点

Indikator- indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir 2018 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJP Tahun 2005- 2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

MISI:

Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 2013- 2018 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi dan Informatika
 - Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:
 - 1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:
 - > Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari pemerintahan dan hukum
 - Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya.
 - 1.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:
 - Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
 - Sektor pariwisata
 - > Industri kecil
 - Tata ruang
- Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya Kehidupan Beragama.
 Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:
 - 2.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi:
 - > Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan lainnya)
 - Perekonomian masyarakat (industri, perdagangan, UMKM dan koperasi)
 - > Infrastruktur
 - > Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan
 - > Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan
 - 2.2. Melaksanakan nilai- nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari- hari.

Selanjutnya dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018. Dipaparkan juga apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati HSS. Secara sederhana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Visi: Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis dan Produktif

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Nia	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan	Fak	tor
No	terpilih	OPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1 a.	Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah Menjadi Potensi Kekuatan Pengembangan Dengan Secara Maksimal Memanfaatkan Teknologi Dan Informatika, dilaksanakan dengan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi Mewujudkan tata kelola pemerintahan	1) Koordinasi		200
	yang baik, bersih dan melayani	perencanaan antar OPD belum optimal 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas 3) Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah 4) Pemanfaatan sarana	at mufakar	- ASS (A) (A)
		dan prasarana kerja belum optimal 5) Perubahan regulasi menjadi kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 6) Dukungan sumberdaya manusia yang potensial dan kualitatif.	*	7
		7) tersediaan dokumen perencanaan Sebagai referensi pengambilan kebijakan.		√
		8) Dukungan sarana prasarana yang memadai.		√
		9) Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance.		V
1.2	Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, olah raga, seni dan budaya. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secaraluas, industry kecil, dan pariwisata, meliputi:			

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan	Fak	tor
No	terpilih	OPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. b d	Sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sektor pariwisata Industri kecil Tata ruang	1) Koordinasi perencanaan antar SKPD belum optimal 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas 3) Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana kerjabelum optimal		
2	Meningkatkan Pendapatan Sumber Keuangan Daerah Dan Perekonomian Masyarakat Beriring Dengan Meningkatnya Kehidupan Beragama. Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:	Оршна	Д. XX	
2.1 a.	Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan daerah (PAD, Perimbangan dan Penerimaan lainnya)	Koordinasi perencanaan antar OPD		
		belum optimal 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas 3) Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah	at mulakar	\$ 10 m
		1) Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal		
b	Perekonomian masyarakat (industri, perdagangan, UMKM dan koperasi)	Koordinasi perencanaan antar OPD belum optimal		
c d e	Infrastruktur Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan			
2.2	Melaksanakan nilai- nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari- hari.			

3.3 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat

Dalam rangka menetapakan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangungan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan (Pusat) mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

3.3.1 Visi Badan Ketahanan Pangan

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

"Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan"

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan pada tabal berikut ini.

Tabel 10. Pokok-pokok Visi Badan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
	perseorangan, yang terce <mark>rmin</mark> dari tersedianya pangan yang
	cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
	merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
	agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk
	dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Penganekaragaman	Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang
Pangan	beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi
	sumber daya lokal
Sumber Daya Lokal	Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
	mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif
	wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
	kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat
	dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk
	menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi
1	

	sumber daya lokal
Kemandirian	Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan
Pangan	yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin
	pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat
	perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya
	alam, manusia, sosial, ekonomi dan
	kearifan lokal secara bermartabat

3.3.2 Misi Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "lead institution" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- 2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- 3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- 4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- 5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

3.3.3 Tujuan Badan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- 3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
- 4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

- 5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- 6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

3.3.4 Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
- 2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
- 3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- 4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
- Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
- 6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKP tahun 2015-2019, dapat diperhatikan pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN SASARAN
Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekarag aman pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Memperkuat penyediaan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal Memingkatnya ketersediaan pangan yang beragam
berbasis sumber daya lokal berlandaskan	Memantapkan penanganan kerawanan pangan	2. Menurunkan jumlah jumlah penduduk rawan Pangan 2. Menurunnya jumlah jumlah penduduk rawan pangan
kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	Memperkuat sistemdistribusi danstabilisasi hargapangan pokok pokok di tingkat produsen dan konsumen
	4. Mewujudkan penganekaragam an konsumsi pangan masyarakat	4. Meningkatkan konsumsi keragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan 4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman

	berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal		aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	5.	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka
5.	Mewujudkan keamanan pangan segar	6.	Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal Meningkatkan keamanan pangan segar	6.	kecukupan gizi (AKG) Tercapainya keamanan pangan segar

3.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari

produksi dalam negeri; (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019). Strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. (b) peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, (c) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, (d) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan, (e) peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.3.5 Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi keb<mark>utu</mark>han dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, mer<mark>ata</mark> dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bebasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan

sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.3.6 Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi: 1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitaas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat; 2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan; 3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; 4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; 5. Penanganan keamanan pangan segar. Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjang Stok Beras Nasional;
 - b. Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan;
 - c. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - e. Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA);
 - f. Kawasan Mandiri Pangan;
 - g. Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - h. Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - i. Dukungan produksi pertanian dan pemasaran;
 - j. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - k. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID;

- 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, melaui:
 - a. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia;
 - b. Lembaga distribusi pangan masyarakat;
 - c. Lumbung pangan masyarakat;
 - d. Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN;
 - e. Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan;
 - f. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - g. Kajian Jaringan Distribusi Pangan;
- 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - a. Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - b. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. Gerakan Diversifikasi Pangan;
 - d. Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. Model pengembangan pangan pokok lokal;
 - f. Pengawasan keamanan dan mutu pangan;

3.3.7 Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan di atas dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan. Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

- 1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
- 4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (outcome). Pada level sub kegiatan, ditandai dengan adanya perubahan pada sub kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/Smallholder Livelihood Development (SOLID) dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan ke kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan. Perubahan ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKP sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015. Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini:

a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan. Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/Smallholder Livelihood Development (SOLID).

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjang Stok Beras Nasional; (2) Analisis Neraca Bahan Makanan; (3) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (4) Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (5) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); (6) Kawasan Mandiri Pangan; dan (7) Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, ada 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD*) di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu: (1) Pemberdayaan petani kecil dan gender; (2) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran; (3) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan (4) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID.

b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan. Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia; (2) Lembaga distribusi pangan masyarakat; (3) Lumbung pangan masyarakat; (4) Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN; (5) Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; (6) Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan (7) Kajian Distribusi Pangan.

c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan pangan; (2) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) Gerakan Diversifikasi Pangan; (4) analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; (5) Model pengembangan pangan pokok lokal; dan (6) Pengawasan keamanan dan mutu pangan;

d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output kegiatan adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 4 (empat) sub kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan; (2) Pelayanan keuangan dan perlengkapan; (3) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan; (4) Penanganan organisasi, kepegawaian, humas, tata usaha, dan hukum. Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub

kegiatan, yaitu: koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.3.8 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Ketahanan Pangan dalam mencapaisasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran UU No.18/2012. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012.

Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi Boleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di daerah, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang selama ini menjadi acuan, perlu ditinjau kembali agar substansi pengaturannya dapat diperluas sesuai amanat UU No.23/2014.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin. Sementara itu, untuk memberikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015, Peraturan Menteri

Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Melalui kerangka regulasi ini, pelaksanaan kegiatan analisis ketahanan pangan dan program aksi ketahanan pangan dijelaskan di dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi aparat dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan juga dibutuhkan dukungan regulasi terkait, antara lain: perlindungan sumber daya pangan; perlindungan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan lain; penelitian dan pengembangan pangan; kelancaran distribusi pangan; harga dan pemasaran pangan; perdagangan pangan; perlindungan konsumen; dan pengendalian impor pangan; serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penanganan ketahanan pangan melibatkan lintas sektor, lintas waktu dan lintas pemangku kepentingan, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan mantap. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan mengamanatkan Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang membantu mengoordinasikan perumusan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan arahan UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No.18/2012 tentang Pangan, dan memperhatikan agenda prioritas RPJMN 2015-2019 serta Permentan No. 19/HK.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

3.3.9 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, untuk pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat pusat dibutuhkan kelembagaan ketahanan pangan. Sejalan dengan amanat tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusankebijakan dibidang peningkatan

diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Pelaksanaan tugas diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip tata kelola yang baik tersebut meliputi manajemen di Badan Ketahanan Pangan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan ketahanan pangan. Upaya untuk mencapai prinsip tata kelola yang baik diawali dengan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Badan Ketahanan Pangan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi:

- 1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
- 2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance;
- 3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- 4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- 5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
- 7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan 8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur Badan Ketahanan Pangan, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dalam rangka menunjang upaya pencapaian ketahanan pangan nasional,provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk SKPD Ketahanan Pangan yang didasari dengan semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien, efektif dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis. Dengan demikian, dituntut kinerja kelembagaan ketahanan pangan

yang handal baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bentuk dan nama unit kerja yang menangani ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat beragam, seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Bentuk Kelembagaan Ketahanan Pangan Seluruh Indonesia

Nama Lembaga	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah	
Lembaga Ketahanan Pangan	34	479	513	
Badan Ketahanan Pangan/Kantor Ketahanan Pangan	20	156	176	
Badan Ketahanan Pangan/Kantor Ketahanan Pangan dan (Unit Kerja Lain)	10	201	211	
Dinas dan (Unit Kerja Lain)	4	114	118	
Seksi/Sub Bagian/UPTD Ketahanan Pangan	170	8	8	

Sumber: BKP, Kementan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

			The Court of the C	CALL SECTION
No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Fal Penghambat	ktor Pendorong
1	Terlaksananya pembuatan peta rawan pangan dan rawan bencana	Belum tersedianya tenaga yang terampil di bidangnya / pemetaan	1	
2	Terlaksanya pengembangan pangan di wilayah perdesaan	Penataan dan Pembinaan kawasan desa mandiri pangan dan lumbung pangan sebagai cadangan pangan dan terbatas dana untuk kampanye pola pangan B2SA		V

	Rencana Tata Ruang	Permasalahan	Fal	ktor
No.	Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
3	Menetapkan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumberdaya lainnya	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali sehingga diperlukan adanya penetapan lahan pertanian berkelajutan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	V	

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang ketahanan pangan, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang dapat diberdayakan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha baik dalam budidaya tanaman pertanian, pengolahan hasil panen menjadi pangan olahan yang meningkatan nilai tambah dan keuntungan masyarakat dalam mendukung keperluan hidup keluarga

2. Pemantauan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu ada, hal ini tergambar berakitan dengan data tentang klasifikasi Tingkatan Keluarga yang dihimpun oleh Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagai bahan dalam melakukan deteksi awal terjadinya kerawanan pangan melalui kegiatan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui SKPG ini tergambar bahwa dikabupaten HSS secara ketersediaan pangan pada umum aman namun dilihat dari segi akses pangan menggambarkan kondisi waspada dan rawan hal ini tergambar dari masih tinggi angka keluarga Pra sejahtera, dari kemungkinan ini maka diperlukan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3. Pemantauan dan Pembinaan Distribusi pangan masyarakat

Produksi pangan masyarakat (beras) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari data hasil produksi dan perhitungan keperluan pangan masyarakat selama ini mencukupi tapi perlu kewaspadaan dalam distribusi baik dalam wilayah kabupaten maupun ke luar kabupaten, dikawatirkan distribusi pangan(beras) yang besar keluar wilayah kabupaten berdampak terjadi kekurangan stock pangan (beras) dalam daerah, sehingga diperlukan berkembangnya lembaga yang berusaha dibidang perberasan, pemerintah pusat dan Provinsi telah merintis lembaga ini melalui kegiatan PL-DPM (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), TTI (Toko Tani Indonesia) sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan, Anggaran kegiatan Kabupaten dimanfaatkan mendukung pembinaan kelembagaan tersebut.

4. Pembinaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Kecukupan pangan masyarakat (beras) secara berkelanjutan dan terjangkau suatu kondisi yang mendukung pembangunan bidang pangan untuk menciptakan kestabilan keamanan negara. Program kegiatan yang dilakukan pembianaan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat desa sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan desa merupakan upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat didesa, Pemerintah kabupaten berupaya

merealisasikan pelayanan minimal dengan mealokasikan Anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

5. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kondisi keamanan pangan yang beredar di Masyarakat perlu pembinaan dan pengawasan terkait sering dijumpainya pemakaian bahan pewarna, pengawet dan pemakaian insectisida di atas ambang aman dikonsumsi atau bahkan bahan-bahan yang dilarang pemanfaatannya.

6. Penurunan Konsumsi Beras

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan pangan Daerah seiring dengan peningkatan Jumlah Penduduk, bertambahnya luas lahan untuk perumahan dan kemungkinan besar terjadinya pengurangan lahan sawah, diperlukan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan budidaya sumber pangan lokal non beras.

7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat

Kualitas dan Kuantitas konsumsi pangan masyarakat sebagian besar masih rendah yang ditunjukan dengan angka Pola Pangan Harapan(PPH) Konsumsi masih belum memenuhi target, terkait dengan permasalahan ini diperlukan upaya-upaya melalui Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan Lomba Cipta Menu serta budaya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi sehat dan Aman

8. Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Organisasi lintas sektoral diluar kedinasan yang dibentuk sebagai mitra pemerintah, Keberadaannya memberikan masukan, saran, pertimbangan teknis kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan menyangkut pangan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Ketahanan Pangan telah menetapkan visi, yaitu :

"TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH MELALUI CADANGAN PANGAN DAERAH DAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT"

Mempunyai makna bahwa Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan daerah yang menjamin ketersediaan pangan dimasyakat dan daerah yang berkelanjutan, makin membaiknya capaian pola pangan harapan, dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut di tempuh melalui Misi:

- a. Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah
- b. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
- c. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

- 1. Terjaganya Ketersediaan Pangan
- 2. Tercukupinya Konsumsi Pangan
- 3. Terjaminnya Keamanan Pangan Segar
- 4. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja

Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan serta memantau pencapaian kinerja. Sasaran Jangka menengah yang akan dicapai, sebagai berikut :

- 1. Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama
- 2. Tingkat Konsumsi Pangan Utama
- 3. Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)
- 4. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat (Ton)
- Tingkat Konsumsi Pangan Beras (Kg/tahun)
- Tingkat Konsumsi Pangan Daging/Unggas (Kg/tahun)
- Tingkat Konsumsi Pangan Ikan (Kg/tahun)
- Skore Pola Pangan Harapan (PPH)
- Persentase Pangan Segar yang tercemar (%)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti
- Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP
- Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (%)

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

			TARGET			TARGET	KINERJA
NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2017	2018
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	92,653 Ton	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	59,653 Ton	92,653 Ton
2	Tercukupinya Konsumsi Paangan	Tingkat Konsumsi Pangan : Beras	26.872.366 Kg/Tahun	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan : Beras	26.571.901 Kg/Tahun	26.872.366 Kg/Tahun
		Daging/ Unggas	1.545.375 Kg/Tahun		Daging/ Unggas	1.528.096 Kg/Tahun	1.545.375 Kg/Tahun
		lkan	8.156.149 Kg/Tahun		Ikan	8.064.954 Kg/Tahun	8.156.149 Kg/Tahun
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	82		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	79,72	82
3	Terjaminnya Keamanan Pangan segar	Persentase Pangan segar yang tercemar	<u><</u> 10%	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan Segar yang tercemar	<u><</u> 20%	≤10%
4	Meningkatkan Pelayanan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	Meningkatnya Pelayanan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81
	Akuntabilitas Kerja	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	Akuntabilitas Kerja	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	A
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

4.3 Strategi dan Kebiijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, dapat ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan adalah :

- Menciptakan keamanan dan stok pangan guna menuju ketahanan pangan yang tangguh
- 2) Menjaga ketersediaan cadangan pangan masyarakat
- 3) Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (desa mapan, lumbung pangan masyarakat, lembaga distibusi pangan)
- 4) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
- 5) Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi .
- 6) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya disekitarnya
- 7) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman dikonsumsi
- 8) Pengawasan dan pembinaan mutu pangan olahan masyarakat

4.3.2 Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh OPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan adalah :

大公司 (11 日子の大元)

- 1. Meningkatkan kelembagaan pengelola pangan dipedesaan
- 2. Pemenuhan pangan dari produksi dalam daerah
- 3. Peningkatan akses pangan masyarakat
- 4. Pemantauan dan analisis harga dan pasokan daerah
- Pengembangan penganekaragaman (diversifisikasi), keamanan pangan, pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal
- 6. Perbaikan status gizi masyarakat
- 7. Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman sumberdaya pangan lokal.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018

VISI: TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH MELALUI CADANGAN PANGAN DAERAH DAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT Misi I: Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
Terjaganya Ketersediaan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	 Menciptakan keamanan dan stok pangan guna menuju ketahanan pangan yang tangguh Menjaga ketersediaan cadangan pangan masyarakat Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (desa mapan, lumbung pangan masyarakat, lembaga distibusi pangan) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya disekitarnya 	Meningkatkan kelembagaan pengelola pangan dipedesaan Pemenuhan pangan dari produksi dalam daerah Peningkatan akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis harga dan pasokan daerah Pengembangan penganekaragaman (diversifisikasi), keamanan pangan, pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal Perbaikan status gizi masyarakat					

Misi II : Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan						
Terjaminnya Keamanan Pangan Segar	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar	 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman dikonsumsi Penanganan Keamanan Pangan Segar 	Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman sumberdaya pangan lokal. Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan Segar						
Misi III : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan						
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Hasil Evaluasi AKIP Bernilai BB	Peningkatan mutu dan SDM serta pelaporan yang sesuai standar.	Peningkatan dan Pelatihan SDM bidang keuangan dan perencanaan						



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Periode 2014 – 2018

5.1. Program Dan Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

what muray

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan penyedian jasa tanaga pendukung Administrasi/Teknis
- lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemelihaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

- SKPD
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Koordinasi Kebijakan Perberasan
- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)
- Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Desa Mandiri Pangan
- Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

- Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
- Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan
- Dewan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman
- Gerakan Peningkatan Konsumsi Susu, Telor dan Daging
- Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman

Program Peningkatan Pengawasan Pangan

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

5.2 Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran

Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS disusun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018, secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran I (Tabel 5.1).

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
		2013	2017	2018	THE OWNER	
1	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat		59,653 Ton	92,653 Ton	92,653 Ton	
2	Skore Pola Pangan Harapan		79,72	82	82	
3	Persentase Pangan Segar yang Tercemar		<u><</u> 20%	<u><</u> 10%	<u><</u> 10%	
4	Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP		BB	Α	Α	

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 (Revisi 2017) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan, disusun dengan mengacu pada :

- 1. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2009 2016
- 2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta upaya mendukung terwujudnya:

- 1. Pencapaian swasembada pangan
- 2. Peningkatan diversifikasi pangan
- 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

Selain itu Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan mayarakat.

Kandangan, Maret 2017 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Pembina Utama Muda NIP. 19601014 198703 1 009



Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan

										Canaia	n Kineria Progra	am dan Kerangka	Dendanaan						
Ko	de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Indikator Kineria Program (outcome)	ng Urusan Pemerintahan an Program Prioritas Indikator Kinerja Program (outcome)		2/	014	-	1015		2016	1	2017	1	2018	20	10		a pada akhir periode	SKPD Penanggung
140	-	Pembangunan	manaci ranoja i rogiam (odioonie)	Awal RPJMD (2013)	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	RPJMD Rp	Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		Urusan Wajib																	
21 0	1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	331.068.200	100%	397.763.397	100%	429.718.005	100%	347.196.085	100%	348.523.500	100%	348.523.500	100%	1.855.269.187	DINAS KETAHANAN PANGAN
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	1.240.000	12 bulan	1.374.900	12 bulan	1.710.000	160 lbr, 140 lbr, 25 lap, 25 bh	1.880.000	160 lbr, 140 lbr, 20 lap, 20 bh	1.780.000	160 lbr, 140 lbr, 20 lap, 20 bh	1.780.000	5 tahun	7.984.900	
			 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 	12 bulan	12 bulan	37.860.000	12 bulan	58.500.000	12 bulan	60.480.000	6 rekening	18.840.000	6 rekening	18.840.000	6 rekening	18.840.000	5 tahun	194.520.000	
			perizinan kendaraan dinas/operasional	55 unit	55 unit	13.600.000	37 Unit	11.750.000	37 Unit	10.000.000	9 unit	3.750.000	9 unit	3.460.000	9 unit	3.460.000	149 unit	42.560.000	
			Penyebaraan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD Penyediaan jaga perbajkan peralatan kerja	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	2 Kali	11.000.000	2 Kali	9.000.000	2 Kali	9.000.000	5 tahun	20.000.000	
			- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0 unit	0 unit	0	38 Unit	8.100.000	0 unit	0	23 buah	9.900.000	31 buah	10.200.000	31 buah	10.200.000	116 unit	28.200.000	
			- Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	38.511.400	12 bulan	31.952.897	12 bulan	38.803.205	42 jenis	28.471.200	46 jenis	28.471.200	46 jenis	28.471.200	5 tahun	166.209.902	
			- Penyediaan barang cetakan & penggandaan	12 bulan	12 bulan	31.105.000	12 bulan	24.664.400	12 bulan	34.692.800	16 pak, 45 m, 60.000 lbr, 40 ekpr	17.986.000	57.660 lbr, 40 ekspr, 16 pak,45 m	17.986.000	57.660 lbr, 40 ekspr, 16 pak,45 m	17.986.000	5 tahun	126.434.200	
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	869.000	12 bulan	834.200	12 bulan	1.030.000	5 jenis	950.000	5 jenis	950.000	5 jenis	950.000	5 tahun	4.633.200	
			Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	15.962.800	12 bulan	14.237.000	12 bulan	12.537.000	10 jenis, 3 jenis	48.790.250	14 jenis, 1 jenis	50.643.750	14 jenis, 1 jenis	50.643.750	5 tahun	142.170.800	
			- Penyeulaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	2.520.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	2 jenis surat kabar harian	2.400.000	2 jenis surat kabar harian	2.400.000	2 jenis surat kabar harian	2.400.000	5 tahun	13.320.000	
			- Penyediaan makanan & minuman	12 bulan	12 bulan	9.900.000	11 bulan	9.900.000	11 bulan	16.880.000	34 kali	15.015.000	35 kali	16.292.000	34 Kali	16.292.000	5 tahun	67.987.000	
			 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	93.635.000	12 bulan	146.963.635	12 bulan	142.650.550	12 bulan	142.650.550	5 tahun	543.249.185	
			 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya 	12 bulan	12 bulan	85.500.000	12 bulan	135.450.000	12 bulan	149.950.000	3 Org	31.250.000	3 Org	35.850.000	3 Org	35.850.000	5 tahun	438.000.000	
			 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	5 tahun	60.000.000	
21 0	1 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	61.650.000	100%	46.300.000	100%	62.200.000	100%	44.600.000	100%	235.992.000	100%	235.992.000	100%	642.842.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	2 unit	11.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	5.500.000	1 unit	21.000.000	1 unit	212.400.000	1 unit	212.400.000	5 tahun	450.000.000	
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	5 unit	36.750.000	5 unit	38.300.000	5 unit	47.100.000	1 unit	23.600.000	1 unit	23.592.000	1 unit	23.592.000	5 tahun	169.342.000	
			- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	unit	24 unit	13.900.000	0 unit	0	32 unit	9.600.000	0	o	0	-	0	-	5 tahun	23.500.000	
21 0	1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur	0	0	0	0	3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.000	
21 0	1 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7 dokumen	7 dokumen	5.100.000	2 Iaporan	2.624.000	7 dokumen	7.450.000	30 Iaporan	8.897.280	30 Iaporan	8.800.000	30 Iaporan	8.800.000	5 tahun	32.871.280	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	2.000.000	2 dokomen	1.124.000	7 dokumen	7.450.000	30 laporan	8.897.280	30 laporan	8.800.000	30 laporan	8.800.000	76 dokomen	28.271.280	
Ш			- Monitoting, Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	3.100.000	12 bulan	1.500.000	0	0	0	0	0	-	0	-	5 tahun	4.600.000	

									0	16		2						
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				2045				m dan Kerangka I	1	040		40	Kondisi Kinerja	pada akhir periode	SKPD Penanggung
Node	Pembangunan		(2013)	2014		2015		2016		2017		2018		20			PJMD	Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	target (5)	(6)	target (7)	(8)	target (9)	(10)	target (11)	Rp (12)	target (13)	(14)	target (13)	(14)	target (15)	Rp (16)	(17)
111	Program Peningkatan	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(0)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(10)	DINAS
21 01 1	6 Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan	Prosentasi Meningkatnya Ketahanan Pangan (pertanian perkebunan)	100%	100%	947.118.180	100%	337.230.500	100%	190.909.212	100%	673.170.000	100%	584.712.500	100%	584.712.500	100%	2.733.140.392	KETAHANAN PANGAN
		- Pengembangan lumbung pangan desa	13 lumbung	17 lumbung	146.925.200	17 lumbung	149.050.000	17 lumbung	143.730.000	15 Lumbung	463.570.000	2 lunmbung	60.890.000	2 lunmbung	60.890.000	19 lumbung	964.165.200	
		- Koordinasi kebijakan perberasan		9 lembaga	21.851.000	9 lembaga	25.368.000	9 lembaga	47.179.212	2 Mitra Usaha	112.960.000	-	0	-	0	9 lembaga	207.358.212	
		 Pengembangan lumbung pangan masyarakat (DAK) 	4 kecamatan	4 kecamatan	778.341.980	4 kecamatan	162.812.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 kecamatan	941.154.480	
		 Penanganan daerah rawan pangan dan desa mandiri pangan 	0	0	0	0	0	0	0	11 Kecamatan	96.640.000	0	0	0	0	11 kecamatan	96.640.000	
		- Pengelolaan Cadangan pangan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.653	324.720.000	53,162 Ton	324.720.000	92.653	324.720.000	
		- Pengelolaan cadangan pangan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 Lumbung	26.200.000	15 Lumbung	26.200.000	15 Lumbung	26.200.000	
		- Pembinaan distribusi dan akses pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Mitra Usaha	79.632.500	2 Mitra Usaha	79.632.500	2 Mitra Usaha	79.632.500	
		- Dewan ketahanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 laporan	93.270.000	2 laporan	93.270.000	2 laporan	93.270.000	
21 01 1	Program Pengembangan 7 Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Prosentasi Meningkatnya Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	100%	100%	234.031.700	100%	184.645.000	100%	204.188.300	100%	311.346.880	100%	363.964.000	100%	363.964.000	100%	1.298.175.880	DINAS KETAHANAN PANGAN
		- Penyuluhan sumber pangan alternatif	10 desa	10 desa	125.868.500	11 desa	80.245.000	11 desa	91.388.300	6 KWT	115.987.880	8 kwt	45.511.000	8 kwt	45.511.000	11 desa	459.000.680	
		- Pengembangan diversifikasi pangan/tanaman	0	0	0	0	0	0	0	1 SD dan 1 Posyandu	195.359.000	2 kali	62.365.500	2 kali	62.365.500	11 desa	257.724.500	
		Gerakan peningkatan konsumsi susu, telor dan dagiang untuk gizi keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 SD dan 1 Posyando	37.820.000	1 SD dan 1 Posyando	37.820.000	1 SD dan 1 Posyando	37.820.000	
		- Gerakan peningkatan konsumsi ikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Posyandu	37.820.000	1 Posyandu	37.820.000	1 Posyandu	37.820.000	
		- Penilaian skor PPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	37.777.500	1 laporan	37.777.500	1 laporan	37.777.500	
		- Pengembangan desa mandiri pangan	0	1 kec (13 desa)	108.163.200	2 kec (13 desa)	104.400.000	4 kec (15 desa)	112.800.000	0	0	7 Desa	142.670.000	7 Desa	142.670.000	7 Desa	468.033.200	
21 01 1	7 Program Peningkatan Pengawasan Pangan	Prosentasi Meningkatnya Pengawasan Pangan	100%	100%	39.253.800	100%	55.770.000	100%	38.310.000	100%	65.480.000	100%	54.888.000	100%	54.888.000	100%	253.701.800	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Peningkatan mutu dan keamanan pangan	10 desa	10 desa	39.253.800	11 desa	55.770.000	11 desa	38.310.000	4 komoditas	65.480.000	4 komoditas	54.888.000	4 komoditas	54.888.000	4 komoditas	253.701.800	

Kandangan, Maret 2017

Kepala Dinas,

Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP Pembina Utama Muda NIP. 19601014 198703 1 009

MATRIK REVIU RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

			TARGET		INDIKATOR		KONDISI		TARGET	KENERJA PAD	A TAHUN		KONDISI
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KENERJA SASARAN	SATUAN	AWAL RENSTRA (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	AKHIR RENSTRA (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	92.653	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Ton	30,653	44,653	49,653	54,653	59,653	92.653	92.653
2.	Tercukupinya Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	26.872.366	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	Kg/Tahun	25.318.291	25.645.032	25.951.094	26.263.688	26.571.901	26.872.366	26.872.366
		Daging Unggas	1.545.375 Kg/Tahun		Daging Unggas	Kg/Tahun	1.456.003	1.474.794	1.492.395	1.510.370	1.528.096	1.545.375	1.545.375
		Ikan	8.156.149 Kg/Tahun		Ikan	Kg/Tahun	7.684.465	7.783.635	7.876.530	7.971.401	8.064.954	8.156.149	8.156.149
		Skore Pola Pangan Harapan	82		Skore Pola Pangan Harapan	Skore	68	70	73,97	75,21	79,72	82	82
3	Terjaminnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	<u><</u> 10%	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	%	≤ 25	<u>≤</u> 25	<u>≤</u> 25	≤ 20	≤ 20	≤ 10	<u><</u> 10

			TARGET		INDIKATOR		KONDISI		TARGET	KENERJA PAD	A TAHUN		KONDISI
NO	TUJUAN	INDIKATOR IND	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KENERJA SASARAN	SATUAN	AWAL RENSTRA (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	AKHIR RENSTRA (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	Meningkat- nya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76	77	78	79	80	81	81
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklan- juti	100%		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindak- lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Angka	СС	С	В	В	BB	A	A
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklan- juti	<u>100%</u>		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak- lanjuti	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	100

19601014 198703 1 009

Kandangan, Maret 2017 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Ir. H. RUHAIMI ALMAN, MP
Peinbina Utama Muda

VANIR 19601014 198703 1 009

BERITA ACARA HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HSS TAHUN 2017 Nomor:

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun 2017, kami Tim Reviu Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. HSS Nomor: 188.45/070/Kum/2017 Tanggal 9 Februari 2017, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan rincian hasil sebagai berikut:

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan Setelah Reviu

VISI	
Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Melalui Penyuluhan Berkualitas	yang

b.	b. Rekomendasi Tim Reviu / Nara Sumber bertentang Visi								

c. Uraian Visi Setelah Reviu

VISI
Terwujudnya Ketahanan Pangan Melalui Cadangan Pangan Daerah dan Lumbung Pangan Masyarakat

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya	1. Mewujudkan Balai Penyuluhan Balai
Ketahanan Pangan	Penyuluhan Kecamatan yang Sesuai
Daerah Melalui	Standar dan Kompetensi Mendukung
Penyuluhan yang	Ketahanan Pangan
Berkualitas	2. Mewujudkan Ketersediaan dan Ketahanan
	Pangan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

MISI
1.
2.
3.

c. Perubahan Misi Setelah Reviu

MISI					
1. Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah					
2. Meningkatkan Konsumsi Pangan					
3. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar					
4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas					

III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan Balai	Meningkatkan Kelas Kemampuan
	Penyuluhan Balai	BPK dan Kelembagaan Tani yang
	Penyuluhan Kecamatan	Sesuai Kompetensi dan standar.
	yang Sesuai Standar dan	
	Kompetensi Mendukung	
	Ketahanan Pangan	
2.	Mewujudkan Ketersediaan	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani
	dan Ketahanan Pangan	dalam mendukung peningkatan
		ketahanan pangan.
		Peningkatan Kualitas Pelayanan
		Publik.
	·	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Daerah.

b. Rekomendasi Tim reviu / Nara Sumber Tentang Tujuan

1.	
2.	
3.	

c. Uraian Tujuan Setelah Reviu

TUJUAN	
1. Terjaganya Ketersediaan Pangan	
2. Tercukupinya Konsumsi Pangan	
3. Terjaminnya Keamanan Pangan Segar	
4. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kelas	Meningkatkannya kelas
Kemampuan BPK dan	kemampuan Balai Penyuluhan
Kelembagaan tani yang	Kecamatan (BPK) dalam
sesuai kompenti dan	mendukung peningkatan ketahanan
standar	pangan.
2. Meningkatkan pelayanan	Meningkatnya kelas kelompok tani
dan kinerja Bapeluh KP dan	dalam mendukung peningkatan
Balai Penyuluhan	ketahanan pangan.
Kecamatan	

3. Meningkatnya Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

1.		
2.		
3.		

c. Uraian Sasaran Setelah Reviu

SASARAN
1. Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama
2. Tingkat Konsumsi Pangan Utama
3. Terjaminnya 4 Komoditas Pangan Segar
4. Hasil Nilai Evaluasi AKIP Bernilai BB

V. INDIKATOR KENERJA SASARAN

a. Uraian indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Persentase Kelas BPK (Balai	Persentase Kelas BPK (Balai
Penyuluhan Kecamatan)	Penyuluhan Kecamatan) menjadi
menjadi Kelas Madya	Kelas Madya
2. Persentasi Kelas Kelompok	Persentasi Meningkatnya Kelas
Tani menjadi Kelompok Tani	Kelompok Tani menjadi Kelompok
Madya	Tani Madya
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Persentase Ketersediaan	Persentaseketersediaan Pangan
Pangan Utama (beras)	Utama Beras
5. Persentase Ketersediaan	Persentase Ketersediaan Energi
Energi dan Protein perkapita	dan Protein perkapita
6. Persentase Stabilitas Harga	Persentase Stabilitas Harga dan
dan Pasokan Pangan	Pasokan Pangan
7. Persentase Skor Pola Pangan	Persentase Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)	Harapan (PPH)
8. Persentase Pengawasan	Persentase Pengawasan
Keamanan Pangan	Keamanan Pangan

b. Rekomendasi Tim reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

1.	
2.	
3.	
4.	

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA
(sebelum reviu)	(setelah reviu)
Persentase Kelas BPK (Balai	-
Penyuluhan Kecamatan) menjadi	
Kelas Madya	
Persentasi Meningkatnya Kelas	-
Kelompok Tani menjadi	
Kelompok Tani Madya	
-	Jumlah Beras Pemda dan
	Masyarakat (Ton)
Ketersediaan Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan
(beras)	Utama Beras (Kg/Tahun)
Persentase Ketersediaan Energi	Tingkat Konsumsi Pangan
dan Protein perkapita	Utama Daging/Unggas
	(Kg/Tahun)
Persentase Stabilitas Harga dan	Tingkat Konsumsi Pangan
Pasokan Pangan	Utama Ikan (Kg/Tahun)
Persentase Skor Pola Pangan	Skore Pola Pangan Harapan
Harapan (PPH)	(PPH)
Persentase Pengawasan	Pensentase Pangan Segar 4
Keamanan Pangan	Komoditi yang Tercemar
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat
-	Persentase Keluhan Pengaduan
	Layanan yang Ditindak Lanjuti
-	Indikator Nilai Hasil Evaluasi
	AKIP
-	Persentase Temuan
	BPK/Inspektorat yang
	Ditindaklanjuti

VI. INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

	SASARAN	IKU
1.	Meningkatkan Ketahanan	1. Persentase Ketersediaan
	Pangan Daerah	Utama (beras) 309%

b. Rekomendasi Tim reviu/Narasumber tentang IKU

1.		
2.		
3.		

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU	IKU	
(sebelum reviu)	(setelah reviu)	
1. Persentase Ketersediaan Utama (beras) 309%	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat (59,653 Ton)	
-	Skore Pola Pangan Harapan (PPH) (79,72)	
-	Persentase Pangan Segar yang Tercemar (< 20%)	
	Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP (BB)	

VII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja	Alasan (sebelum	Cara Pengukuran	Keterangan/ Kriteria
Sasaran	reviu)	(sebelum reviu)	(sebelum reviu)
Persentase Kelas	,	Jumlah kelas BPK	,
BPK (Balai		(Utama/madya tahun	
Penyuluhan		2015 dibagi jumlah	
Kecamatan)		kelas BPK	
menjadi Kelas		(utama/madya) tahun	
Madya		2014 di kali 100%	
Persentasi		Jumlah kelas	
Meningkatnya		kelompok tani	
Kelas Kelompok		(Utama/madya tahun	
Tani menjadi		2015 dibagi jumlah	
Kelompok Tani		kelas kelompok tani	
Madya		(utama/madya) tahun	
		2014 di kali 100%	
Indeks Kepuasan		Hasil Survey IKM	
Masyarakat			
Persentase		Ketersediaan beras	
Ketersediaan		(ton) dibagi Total	
Pangan Utama		(Kebutuhan beras)	
(beras)		dikali 100%	
Persentase		Ketersediaan	
Ketersediaan		energi/kapita/hari	
Energi dan		dibagi 2.200 kkal	
Protein perkapita		dikali 100%.	
		Ketersediaan	
		protein/kapita/hari	
		dibagi 57 gr dikali	
Domontoss		100%	
Persentase		$= \underline{A} \times 100$	
Pengawasan Keamanan		A : Jumlah sampel	
Pangan		komoditi pangan segar	
ı aligali		yang tercemar	
		B: Jumlah sampel	
		Komoditas pangan	
		segar	
		ocsai	

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS

c. Uraian IKS /IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan/ Kriteria (sebelum reviu)
Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat		CPP + CPM CPP= Cadangan Pangan Pemerintah CPM= Cadangan Pangan Masyarakat	,
Tingkat Konsumsi Pangan utama Beras		= (313 gr/hr x 365/1000 x jumlah penduduk kab.	
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Daging		= (18 gr/hr x 365/1000 x jumlah penduduk kab.	
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Ikan		= (34,68 gr/hr x 365/1000 x jumlah penduduk kab.	
Skore Pola Pangan Harapan (PPH)		Indeks PPH = Prosentase (%) AKG dikali kebutuhan masing-masing komoditas	
Persentase Pangan Segar yang Tercemar		= A x 100 B A: Jumlah sampel komoditi pangan segar yang tercemar B: Jumlah sampel Komoditas pangan segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	
Indek Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang DitindakLanjuti		Rata-rata nilai hasil survey Jumlah yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang masuk X 100%	
Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP		Hasil penilaian Inspektorat tahun 2017	

Persentase	Jumlah yang	
Temuan	ditindaklanjuti dibagi	
BPK/Inspektorat	jumlah temuan	
yang	BPK/Inspektorat x	
Ditindaklanjuti	100%	

VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KENERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	1	KONDISI AKHIR				
		(2013)	2014	2015	2016	2017	2018	RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Kelas BPK	%		57,30	61,80	70,30	80,80	90	90
(Balai Penyuluhan								
Kecamatan) menjadi								
Kelas Madya								
Persentasi	%		60,30	70,80	80,30	90	95	95
Meningkatnya Kelas								
Kelompok Tani								
menjadi Kelompok								
Tani Madya								
Indeks Kepuasan	Angka		77	78	79	80	81	81
Masyarakat								
Ketersediaan Pangan	%		308	309	310	311	312	312
Utama (beras)								
Persentase	%		70	70	70	80	90	90
Ketersediaan Energi								
dan Protein perkapita								
Persentase Stabilitas	%		80	80	80	100	100	100
Harga dan Pasokan								
Pangan								
Persentase Skor Pola	%		70	75,21	73,97	79,72	85.48	85,48
Pangan Harapan (PPH)								
Persentase	%		80,14	85,48	90	90	95	95
Pengawasan								
Keamanan Pangan								

Sasaran

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU/ Setelah Reviu

INDIKATOR		KONDISI AWAL	TADILLY KIND IA DANA TAUIN								
KENERJA	(2013)		2014	2015	2016	2017	2018	AKHIR RENSTRA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Ton	30,653	44,653	49,653	54,653	59,653	92,635	92,635			
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Beras	Kg/Thn	25.318.291	25.645.032	25.951.094	26.263.688	26.571.901	26.872.366	26.872.366			
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Daging	Kg/Thn	1.456.003	1.474.794	1.492.395	1.510.370	1.528.096	1.545.375	1.545.375			
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Ikan	Kg/Thn	7.684.465	7.783.635	7.876.530	7.971.401	8.064.954	8.156.149	8.156.149			
Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Skore	68	70	73,97	75,21	79,72	82	82			
Persentase Pangan Segar yang Tercemar	%	<u>≤</u> 25%	<u><</u> 25%	<u><</u> 25%	<u><</u> 20%	<u><</u> 20%	≤ 10%	≤ 10%			
Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	76	77	78	79	80	81	81			
Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang DitindakLanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100			
Indikator Nilai Hasil Evaluasi Akip	Angka	СС	С	В	В	BB	A	A			
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100			

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka Tabel Rencana Strategis OPD Dinas Ketahanan Pangan 2014-2018 Hasil Reviu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)			KINERJA PADA			KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Ton	30,653	44,653	49,653	54,653	59,653	92,635	92,635
2.	Tercukupinya Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Beras	Kg/Thn	25.318.291	25.645.032	25.951.094	26.263.688	26.571.901	26.872.366	26.872.366
			Daging	Kg/Thn	7.684.465	7.783.635	7.876.530	7.971.401	8.064.954	8.156.149	8.156.149
			Ikan	Kg/Thn	1.456.003	1.474.794	1.492.395	1.510.370	1.528.096	1.545.375	1.545.375
			Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Skore	68	70	73,97	75,21	79,72	82	82
3.	Terjaminnya Keamanan Pangan Segar	Terjaminnya 4 Komoditas Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	%	≤ 25%	≤ 25%	≤ 25%	≤ 20%	≤ 20 %	≤ 10%	≤ 10%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)			KINERJA PADA			KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Hasil Nilai Evaluasi AKIP BB	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	76	77	78	79	80	81	81
			Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang DitindakLanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	cc	С	В	В	ВВ	A	A
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mengetahui :	Kandangan, Maret 2017							
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Tim Reviu Rens	Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Ketahanan Pangan :						
Kabupaten Hulu Sungal Selatan	1. Ketua Tim							
* DINAS **	2. Anggota							
Ir.H.RUHAIMI ALMAN, MP	3. Anggota							
Pembina Utama Muda NIP. 19601014 198703 1 009	4. Narasumber							